

Pendekatan Teknologi dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Kegiatan E-Pilkada di Provinsi Jawa Barat

Handy Fahrulrozy Hidayat^a, Nova Nurafiah Budiana^b, Raynald Masura^c, Fandi Ahmad^d

^{a,b,c}Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : ^ahandyfahrulrozy@gmail.com, ^bnovanurafiah5@gmail.com,

^craynaldmasura16@gmail.com

Abstrak

Covid-19 membawa suatu arus perubahan terutama dalam penerapan teknologi, akselerasi dan percepatan hampir terjadi di segala bidang, dimana di dalam setiap segmennya dipaksa untuk tetap berjalan, meski dengan adanya pembatasan seluruh aktivitas, tidak terkecuali pada proses Pilkada atau pemilihan daerah, yang dimana dalam prosesnya berjalan lebih banyak dengan cara manual, padahal tidak memungkinkan untuk dilakukan karena pandemi, oleh karena itu inovasi dalam proses pemilihan daerah menjadi hal yang patut diperhatikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana di dalamnya peneliti mencoba observasi dengan Ketua KPU Kabupaten Cianjur dengan harapan mengetahui kondisi riil yang ada di lapangan. Kemudian di tambah dengan studi literasi untuk memperdalam lagi atau mengetahui hambatan-hambatan yang berpotensi ketika program ini bergulir. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah berupaya untuk menyelenggarakan proses pemilihan dengan pendekatan teknologi meskipun pada kenyataannya masih ada resistensi dari masyarakat, maka dari itu perlunya komunikasi dan sosialisasi sesegera mungkin agar timbul kebudayaan baru di masyarakat dan meminimalisir resistensi yang ada.

Kata Kunci : Pelayanan Publik, Pilkada, Inovasi, Teknologi

Technology Approach in Efforts to Improve Public Services Through E-Pilkada Activities in West Java Province

Abstract

Covid-19 brings a current of change, especially in the application of technology, acceleration and acceleration have occurred in almost all fields, wherein each segment is forced to continue running, even with restrictions on all activities, including the Pilkada process or regional elections, which in the process runs more manually, even though it is not possible to do it because of the pandemic, therefore innovation in the regional election process is something that deserves attention. This study uses a qualitative descriptive approach, in which the researcher tries to observe with the Chairman of the KPU Cianjur Regency in the hope of knowing the real conditions in the field. Then it is added with a literacy study to deepen or find out the potential obstacles when this program is rolled out. From the results of the study, it is known that the government is trying to organize the election process with a technological approach even though in reality there is still resistance from the community, therefore it is necessary to communicate and socialize as soon as possible so that a new culture emerges in the community and minimizes existing resistance.

Keywords: Public Service, Pilkada, Innovation, Technology

A. PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia telah memasuki Era industri 4.0, yang dimana selanjutnya akan memasuki Era industri 5.0 dan segala sesuatunya melibatkan berbagai teknologi dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi, termasuk dalam ranah pemerintahan. Ketika mendengar kata Pemerintahan, stereotype yang beredar di masyarakat adalah kinerja pelayanan publik yang lama dan ketinggalan zaman serta minimnya teknologi. Padahal, saat ini banyak sekali kantor pemerintah yang sudah menggunakan teknologi, hanya saja penggunaan teknologi yang lebih canggih belum tersebar merata. Salah satu contoh dari adanya penggunaan teknologi yang canggih tetapi belum tersebar merata adalah pemanfaatan teknologi pada Pilkada yang diselenggarakan oleh KPUD di Provinsi Jawa Barat. Seiring dengan perkembangan teknologi sudah banyak negara yang melakukan kegiatan pemilihan umum melalui platform digital. Tetapi untuk di Indonesia ini kegiatan pemilihan daerah masih dilakukan secara manual. Inovasi bisa berbentuk atau berupa apa saja dalam memperkenalkan suatu hal baru yang mengarah kepada keberhasilan dalam kehidupan manusia.

(Brewer and Tierney, 2012).

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu inovasi yang dapat membawa perubahan dalam bidang teknologi di Indonesia, khususnya dalam melakukan kegiatan Pilkada yang diselenggarakan melalui platform digital (e-Pilkada). E-Pilkada disini terdiri dari :

1. E-Kampanye

Sebuah sistem yang menggunakan teknologi dalam berkampanye dengan mudah dan cepat. E-Kampanye sendiri merupakan suatu ajang untuk mendapatkan dukungan dari rakyat kepada para paslon melalui platform digital tersebut. Sistem yang akan dibuat dengan harapan, dapat memenuhi kebutuhan informasi kepada rakyat mengenai, parpol pengusung dan parpol yang ada di Indonesia, profil dan latar belakang Paslon, kampanye daring, debat

antara paslon, serta tanya jawab dengan paslon.

2. E-Voting

E-Voting merupakan sebuah sistem dalam proses pengumpulan suara yang dilakukan secara elektronik, dan didalamnya memiliki keunggulan dalam proses perhitungan suara dan pengolahan data sehingga dapat menekan biaya pemilihan dan memiliki andil.

(nani purwani, 2015)

Di saat dunia sedang berjuang menghadapi pandemi Covid-19 yang mengharuskan setiap masyarakat untuk membatasi kegiatan di luar rumah, tetapi di Indonesia sendiri, kegiatan Pilkada harus tetap diselenggarakan. Seperti contoh pada penyelenggaraan Pilkada sebelumnya, tepat pada bulan Desember tahun 2020, angka positif Covid-19 di Indonesia sedang berada pada kondisi yang mengkhawatirkan. Hal ini dapat dilihat dari adanya lonjakan kasus positif Covid-19 yang bertambah sebanyak 8.074 kasus, sehingga totalnya menjadi 743.198 kasus. Akan tetapi, pemerintah tidak mengindahkan adanya pandemi tersebut sehingga pelaksanaan pilkada masih tetap diselenggarakan walaupun banyak pro-kontra yang terjadi di masyarakat.

Maka dari itu, jurnal ini akan membahas mengenai pendekatan teknologi dalam upaya peningkatan pelayanan publik melalui kegiatan e-Pilkada di Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini, kami mengambil contoh penerapan pemilihan umum berbasis digital di beberapa negara seperti Brazil, Australia, dan Estonia. Namun, dalam penerapan pemilihan umum berbasis digital tidak selamanya berhasil seperti di negara Belanda dan Venezuela. Pada tahun 2004 di negara tersebut gagal dalam pelaksanaan pemilihan umum berbasis digital, dikarenakan kurangnya tingkat kepercayaan terhadap teknologi serta kepada penyelenggara pemilihan umum. Meskipun demikian, untuk saat ini tidak menutup kemungkinan negara Belanda dan Venezuela menerapkan kembali sistem pemilihan umum berbasis digital, begitu pula dengan Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat.

Eksistensi bisa juga diartikan sebagai keberadaan. Dimana keberadaan yang di maksud adalah diterima atau tidaknya oleh lingkungan sekitar. Dengan begitu eksistensi dapat diartikan sebagai kondisi diterima atau tidaknya di dalam suatu lingkungan atau masyarakat.

(Sjafirah dan Prasanti, 2016 : 3-4)

Resistensi adalah suatu sikap penolakan atau pernyataan tidak menyetujui akan adanya perubahan yang kurang sesuai dengan lingkungan sekitar.

(Barnard dan Jonathan)

Teknologi adalah alat yang dikembangkan oleh manusia untuk membantu dan mempermudah kinerja manusia

(Fischer, 1975)

E-Pilkada merupakan upaya untuk menciptakan desain baru yang inovatif untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan mengadopsi kemajuan teknologi digital

(Herie Saksono, 2020)

Pelayanan publik adalah suatu kegiatan pemberian pelayanan umum oleh instansi pemerintah baik dalam bentuk barang maupun jasa sebagai upaya dari pemenuhan kebutuhan masyarakat.

(Robert, 1996 : 30)

Inovasi merupakan sebuah penemuan atau ciptaan baru yang dianggap baik dalam rangka memajukan kehidupan manusia.

(Everett Rogers, 2003 : 12)

B. PEMBAHASAN

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi dan informasi sudah menjadi kebutuhan primer, dimana teknologi sangat membantu manusia dari segala aspek, bahkan teknologi pun dapat menciptakan suatu peluang untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, dan menjadi inovasi bagi pengembangan teknologi di bidang pemerintahan, seperti penerapan e-Pilkada dalam pemilihan umum.

E-Pilkada sendiri bertujuan untuk melakukan pengembangan sistem pemilihan yang bertransformasi pada teknologi informasi, sehingga dapat berfungsi secara

efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pilkada yang jujur dan adil.

E-Pilkada di Indonesia masih memuat berbagai pertimbangan sehingga dalam pelaksanaannya masih belum bisa dilakukan secara optimal. Ketidak optimalan tersebut terjadi karena adanya beberapa hambatan, seperti:

1. Akses jaringan setiap wilayah di Indonesia yang tidak merata, karena masih ada beberapa daerah di pedalaman yang belum mendapat akses jaringan internet atau listrik.
2. Tidak semua masyarakat di Indonesia memiliki alat komunikasi seperti gawai, karena tidak cukup mampu untuk membelinya.

Perencanaan e-Pilkada ini merupakan salah satu bentuk dari inovasi dan peluang dalam ranah pemerintahan khususnya dalam peningkatan pelayanan publik di masa pandemi.

Melihat pengalaman dari penerapan Pilkada yang dilakukan secara manual pada masa pandemi, dimana pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu bersepakat melanjutkan Pilkada serentak pada tahun 2020. Meski desakan penundaan menguat, mereka tetap melaksanakan pemilihan di 270 daerah pada 9 Desember lalu. Dengan dipaksakannya pelaksanaan pilkada tersebut, banyak pegawai dari KPU, Bawaslu, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bekerja lebih keras dari biasanya karena harus memperhatikan dan menyesuaikan penerapan pilkada dengan pandemi covid-19. Karena hal tersebutlah, banyak memakan korban jiwa. Berdasarkan data per 15 Januari 2021, sebanyak 114 penyelenggara pemilihan mengalami kecelakaan kerja dan 41 penyelenggara pemilihan meninggal dunia. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada saat penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019, yang mengakibatkan sebanyak 554 orang meninggal dunia yang terdiri dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), petugas KPU, Bawaslu dan personel Polri serta petugas yang sakit sebanyak 3.788 orang.

Urgensi penerapan teknologi menjadi sangat mendesak untuk dilakukan, karena dalam penggunaannya, teknologi dapat membantu masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan pilkada, sehingga kasus serupa tidak akan terulang kembali. Meskipun hingga saat ini penerapan teknologi dalam penyelenggaraan pemilihan umum masih belum bisa diterima oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, sama halnya dengan yang dilakukan oleh masyarakat di negara maju (Belanda dan Venezuela) dimana masyarakatnya belum menerima inovasi baru dikarenakan tingkat kepercayaan akan penerapan teknologi dalam penyelenggaraan Pemilu yang rendah. Tetapi tidak semua masyarakat juga menolak adanya penerapan teknologi, seperti masyarakat di negara Brazil dan Australia sehingga pelaksanaan e-Pemilu berjalan secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Bu Selly Nurdinah, S.H.I., M.Hum selaku Ketua KPU Kabupaten Cianjur didapatkan hasil bahwa kegiatan Pilkada sebelum dan setelah pandemi tentunya mengalami perbedaan, yang paling signifikan dimana dalam kegiatan Pilkada penyelenggaraannya dilaksanakan dengan berpedoman pada protokol kesehatan. Selain itu, kegiatan pilkada juga berlandaskan pada peraturan KPU RI No. 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota serta Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Non-alam.

Saat pelaksanaan Pilkada serentak pada masa pandemi yang berlandaskan pada peraturan KPU RI sudah berjalan dengan efektif karena berdasarkan data kuantitas yang ada, partisipasi pemilih Kab.Cianjur menunjukkan adanya peningkatan partisipasi pemilih sebesar 67% dari periode sebelumnya sebesar 56,7%. Selain itu, minimnya kendala dan tidak adanya *cluster* baru masyarakat yang terindikasi positif Covid menandakan bahwa pelaksanaan pemilihan berjalan dengan kondusif. Meskipun tidak menutup kemungkinan terdapat pemilih yang tidak memberikan hak

suaranya (golput) pada kegiatan Pilkada. Hal tersebut disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal terjadi karena adanya masyarakat lebih mendahulukan urusan yang lebih menguntungkan untuk pribadi daripada melaksanakan pemilihan, sedangkan untuk faktor eksternal itu sendiri terjadi karena alasan administrasi seperti masyarakat yang tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP). selain dari 2 faktor tersebut terdapat alasan lain mengapa banyak masyarakat yang lebih memilih golput yaitu karena kurang maksimalnya sosialisasi mengenai waktu pelaksanaan pemilihan, dan karena alasan politik seperti tidak adanya pilihan dari kandidat yang tersedia serta munculnya pemikiran bahwa pemilihan tidak membawa perbaikan atau perubahan kearah yang lebih baik.

Meskipun pendataan dilakukan secara manual, tentu akan banyak yang mengalami kebocoran data dan biasanya dilakukan oleh oknum. walaupun begitu, kewajiban dari penyelenggara tingkat apapun wajib merahasiakan data dari pemilu, maka dari itu penyelenggara pemilu dan pemilihan tingkat apapun diikat oleh sumpah janji jabatan dan kode etik. Selain itu, kebocoran data juga diakibatkan oleh adanya penyadapan atau hack dari pihak yang tidak bertanggung jawab itu bisa saja terjadi dilihat dari semakin berkembangnya teknologi.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Saat ini dunia sedang berjuang menghadapi pandemi Covid-19 yang mengharuskan setiap masyarakat untuk membatasi kegiatan di luar rumah, tetapi di Indonesia sendiri, kegiatan pemilihan harus tetap diselenggarakan seperti Pilkada 2020. Akibat hal ini, banyak pegawai dari KPU, Bawaslu, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bekerja lebih keras dari biasanya sehingga mengakibatkan banyak penyelenggara yang sakit bahkan meninggal dunia. Oleh karena itu, urgensi dalam penerapan teknologi sangat dibutuhkan pada pelaksanaan Pilkada, meskipun terjadi penolakan dari

sebagian masyarakat karena membutuhkan waktu untuk penyesuaian terhadap perubahan tersebut.

Maka dari itu, peneliti memberikan rekomendasi bahwa penerapan teknologi menjadi suatu hal yang krusial di Indonesia terutama pada penyelenggaraan Pemilihan berbasis digital (e-pilkada) di Jawa Barat.

REFERENSI

- Indonesia, C.N.N. (07). Mei 2019. *Total 544 Orang KPPS, Panwas dan Polisi Tewas di Pemilu 2019*. Jakarta (Diakses pada 09 September 2021)
- Kartika Mimi dan Agus Yulianto (19). Januari 2021. *KPU: 41 Penyelenggara Meninggal Saat Pilkada 2020*. Jakarta (Diakses pada 12 September 2021 jam 03.02)
- Purwati, N. (2015). *Perancangan sistem e-voting untuk pemilihan kepala daerah (pilkada)*. Bianglala Informatika, 3(1).
- Saksono, H. (2020). *Digital Pilkada: Have Local Elections (Pilkada) been Affected by Digitalization? Attainment, Challenges, and Policy Solutions*. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 12(2), 287-299. (Diakses pada 12 September 2021 jam 23.15)
- Siti Maryam, N. (2017). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. *JIPSI- Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 6.
- Sukarti, S. (2020). *Pengaruh Eksistensi Pandita terhadap Minat Umat Buddha pada Kegiatan di Vihara Abip : Agama Buddha dan Ilmu Pengetahuan*, 5(2), 89-101.
- Suriadi, A.2008. *Resistensi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan*. *Jurnal*. Jakarta : Universitas Indonesia, FISIP, Program Pascasarjana, Program Studi Sosiologi.
- Suwarno, Y. (2008). *Inovasi di sektor publik*.
- Usman, M. F., & Junus, N. (2021). *Urgensi pengaturan E-Voting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak*. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1), 253-268. (Diakses pada 12 September 2021 jam 02.00)
- Widyatingtyas, R. (2002). *Pembentukan pengetahuan sains, teknologi, dan masyarakat dalam pandangan pendidikan ipa*. *Educare*